

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI GORONTALO

Alfian Igrisa<sup>1</sup>, Sri Endang Saleh<sup>2</sup>, Frahmawati Bumulo<sup>3</sup>

*Alfian Igrisa (Universitas Negri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia)<sup>1</sup>*

*Sri Endang Saleh (Universitas Negri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia)<sup>2</sup>*

*Frahmawati Bumulo (Universitas Negri Gorontalo, Kota Gorontalo, Indonesia)<sup>3</sup>*

*alfianigrisa@gmail.com<sup>1</sup>*

*sriendang\_s@ung.ac.id<sup>2</sup>*

*frahmawatibumulo@ung.ac.id<sup>3</sup>*

---

**Abstract:** This Study aimed to determine the effect of the Minimum Wage, Unemployment Rate, and Total Population on the poverty rate of 6 Regencies/Cities in Gorontalo Province. This study used secondary data consisting of time series data (2017-2021) and cross sections (6 Regencies/Cities in Gorontalo Province). Furthermore, the data were analyzed using the panel data with the help of Eviews 9. In addition, this study used a quantitative approach which can be interpreted as a examine certain populations or samples. Meanwhile, the data collection was done using research instrument, and data analysis was conducted quantitatively with the aim of testing established the position of the variables studied and the relationship between one variable to another. The results showed that the Minimum Wage had a negative and significant effect on the regencies/cities' poverty rate in Gorontalo Province, whereas the Unemployment Rate and the Total Population had no effect on the poverty rate/level.

**Keywords:** Property Level, Minimum Wage, Unemployment, Total Population

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Pengangguran dan Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data time series (2017-2021) dan cross section (6 Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo). Analisis yang digunakan adalah panel data dengan bantuan Eviews 9. Penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, penelitian ini berbasis pada penelitian *eksplanatory* yaitu penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan yang lain.. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Tingkat Pengangguran Terbuka (IPT) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, Jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

**KataKunci:** Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk

---

### PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menyelenggarakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sarana pembangunan nasional adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang merupakan penyakit dalam perekonomian, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks bagi setiap penduduk di setiap negara, dalam hal ini penduduk dikatakan miskin jika pendapatannya rendah, pendidikannya rendah, tingkat produktivitas yang dihasilkan rendah, tingkat kesehatannya rendah dan gizinya tidak mencukupi. baik, dan juga tingkat kesejahteraannya masih rendah. Kemiskinan juga disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak memadai dan hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan, baik formal maupun nonformal (Sa'diyah, 2012).

Masalah sosial yang terjadi di setiap negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia telah menjadi masalah sosial sejak lama, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara berkembang yang tentunya akan memiliki masalah pada tingkat kemiskinan penduduknya. Masalah ini merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional di Indonesia. Jadi dalam hal ini upaya kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan harus dilaksanakan secara terpadu (Nasir, 2008). Sedangkan menurut Kuncoro (2017) dalam penelitiannya mendefinisikan kemiskinan sebagai "ketidakmampuan suatu penduduk/orang untuk memenuhi standar kebutuhan minimum". Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh penduduk untuk dapat hidup layak sehingga terhindar dari kemiskinan antara lain pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Atu setya rini, 2010).

Salah satu masalah kompleks yang sering terjadi di negara maju dan berkembang adalah kemiskinan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, sebagai negara berkembang, masalah kemiskinan di Indonesia menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat (Nasir, et al. 2008). Meski pada kenyataannya, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sulit dicarikan solusinya. Pemerintah juga telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan. Namun, program-program tersebut belum memiliki strategi dan kebijakan yang tepat karena tidak secara langsung berpihak pada lapisan masyarakat termiskin (Britha Mikelsen, 2013), namun hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan rakyat.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi di Indonesia, pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mencapai angka 15,61 persen, sedangkan Kabupaten Boalemo memiliki angka kemiskinan sebesar 19 persen, hal ini menjadi masalah yang harus diperhatikan. dipertimbangkan oleh pemerintah provinsi Gorontalo, mengingat kemiskinan merupakan momok yang dapat membuat pembangunan ekonomi di suatu daerah menjadi lambat dan pemerintah akan dianggap gagal dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan pengentasan kemiskinan yang terjadi di suatu daerah dan hal ini harus dikendalikan dengan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

**Tabel 1****Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo 2017-2021**

Wilayah Se Provinsi	Persentase Penduduk Miskin ( Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Boalemo	21,85	20,33	18,87	18,57	19,00
Kab. Gorontalo	20,55	19,84	18,06	17,56	17,89
Pohuwato	21,27	19,40	18,16	17,62	18,08
Bone Bolango	17,81	17,40	16,12	15,81	16,30
Gorontalo Utara	19,23	18,54	16,95	16,88	17,23
Kota Gorontalo	5,70	5,57	5,45	5,59	5,93
Provinsi Gorontalo	17,65	16,81	15,52	15,22	15,61

*Sumber : BPS, 2022*

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dan meningkat kembali pada tahun 2021, terlihat dari tahun 2017-2021 persentase penduduk miskin tertinggi adalah Boalemo yang mencapai 19% dan yang terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,93%. Angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo terkonsentrasi pada mata pencaharian petani.

Menurut Mudrajad Kuncoro (2017), penyebab kemiskinan berdasarkan teori Nurkse yaitu teori lingkaran setan kemiskinan dimana terdapat tiga faktor utama yaitu: (i) Adanya keterbelakangan dan keterbelakangan sumber daya manusia (SDM) yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia yang rendah, (ii) Ketidakefisienan pasar, dan, (iii) Kurangnya modal dan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya pendapatan (tercermin dari laju Pertumbuhan Ekonomi). Pendapatan yang rendah akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Investasi yang rendah akan mengakibatkan akumulasi modal yang rendah sehingga proses penciptaan lapangan kerja juga rendah (Prima Sukmaraga, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Risma Amelia (2012) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah lulusan SMP, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk dan angka harapan hidup. Faktor terpenting penyebab kemiskinan adalah kegagalan pemerintah dalam mengatur laju pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah kegagalan pemerintah dalam mengatur sistem pengupahan, meskipun upah merupakan sumber pendapatan, namun jika sumber pendapatan turun atau tetap maka kesejahteraan juga akan turun atau tetap dan tentunya juga akan mempengaruhi angka kemiskinan. Buruh adalah salah satu pendorong gagalnya pertumbuhan ekonomi meretas kemiskinan. Pekerja di Indonesia mengalami apa yang disebut dengan "upah besi", dimana pekerja diberikan upah sesuai dengan kontrak kerja yang telah diputuskan bersama antara pengusaha dan pekerja (buruh).

**Tabel 2**  
**Upah Minimum Provinsi (Rp) di Provinsi Gorontalo 2017-2022**

Tahun	Upah Minimum Provinsi	
	Per Hari	Per Bulan
2017	81 200	2 030 000
2018	88 272	2 206 813
2019	95 360	2 384 020
2020	103 476	2 586 900
2021	111 553	2 788 826
2022	112 023	2 800 580

Sumber : BPS, 2022

Tabel 2 diatas adalah Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022. Upah yang diberikan ternyata sangat rendah nilai riilnya meski angka nominalnya mungkin cukup tinggi. Penetapan upah minimum oleh pemerintah secara tidak sadar telah menempatkan buruh pada kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer) yang semakin mengalami fluktuasi harga (inflasi).

Dampak upah besi juga berdampak pada penajatan pekerjaan oleh pemberi kerja. Hal ini dikemukakan oleh Charles Brown (2018) yang mengatakan bahwa penentuan upah besi akan berdampak pada penajatan pekerjaan yang akan mengakibatkan pengangguran semakin banyak.

Pengangguran juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum jika kondisi full Employment dapat terwujud. Pengangguran akan berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat, dan hal ini akan menurunkan tingkat kemakmuran yang telah dicapai. Menurunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno, 2010). Angkatan kerja yang tumbuh pesat tentu akan menambah beban tersendiri bagi perekonomian yaitu penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru, sebagian angkatan kerja baru akan menambah jumlah pengangguran yang ada (Dumairy, 2016). Jumlah pengangguran terbuka di Gorontalo dari tahun 2018-2020 berfluktuasi. Selama periode tersebut terlihat bahwa jumlah pengangguran terbuka masih lebih dari satu persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Gorontalo 2017-2021**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo (Persen)	
	Februari	Agustus
2017	3,65	4,28
2018	3,38	3,70
2019	3,25	3,76
2020	3,29	4,28
2021	3,41	3,01

Sumber : BPS, 2022

Secara umum pertumbuhan penduduk di negara berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas yang memadai baik dari segi pendidikan, kesehatan, nilai moral dan etika dan sebagainya merupakan modal pembangunan yang dapat diandalkan bagi suatu negara, tetapi sebaliknya jika kualitasnya rendah akan menjadi beban pembangunan sehingga akan menjadi penghambat pembangunan. Masalah pertumbuhan penduduk bukan hanya masalah jumlah, masalah kepadudukan juga menyangkut kepentingan pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Secara umum, jumlah penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan. Keberadaannya, apalagi dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan tinggi, dinilai hanya menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan menurunkan pendapatan per kapita dan menimbulkan masalah tenaga kerja. Dalam literatur modern, populasi dipandang sebagai pendorong pembangunan. Kegiatan produksi berlangsung karena masyarakat membeli dan mengkonsumsi barang yang diproduksi. Konsumsi dari populasi ini menciptakan permintaan agregat. Peningkatan konsumsi agregat memungkinkan bisnis untuk berkembang, serta perekonomian secara keseluruhan (Dumairy, 2016).

Penduduk sebagai penggerak pembangunan karena jumlah penduduk yang lebih besar sebenarnya merupakan pasar potensial yang menjadi sumber permintaan berbagai barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi sehingga tercipta skala ekonomi dalam produksi yang menguntungkan semua pihak. pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang cukup sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti angka kemiskinan akan turun (Todaro, 2006).

Tekanan masalah kependudukan terhadap pembangunan sebenarnya kurang terkait dengan aspek jumlah, tetapi lebih terkait dengan variabel kependudukan lainnya. Variabel tersebut meliputi: persebaran, komposisi, kepadatan dan pertumbuhan penduduk serta terdapat pula karakteristik penduduk yang bersangkutan seperti pendapatan, kesehatan dan tingkat kemiskinan (Dumairy, 2016). Berikut perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo tahun 2017-2021:

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo 2017-2021**

Wilayah se Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Boalemo	158.333	162.577	167.024	145.868	147.038
Gorontalo	374.923	377.048	378.527	393.107	395.635
Pohuwato	153.991	157.551	161.373	146.432	147.689
Bone Bolango	157.186	159.194	161.236	162.778	164.277
Gorontalo Utara	112.975	114.036	115.072	124.957	126.521
Kota Gorontalo	210.782	215.086	219.399	198.539	199.788
Provinsi Gorontalo	1.168.190	1.185.492	1.202.631	1.171.681	1.180.948

Sumber : BPS, 2022

Table 4 menunjukan bahwa dari tahun 2017-2021 jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari 1.168.190 orang tahun 2017 menjadi 1.185.492 orang tahun 2018 dan 1.202.631 orang tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo menurun menjadi 1.171.681 jiwa dan meningkat kembali pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.180.948 jiwa.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menemukan hubungan yang sangat kuat antara tingkat kemiskinan, penetapan upah minimum, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk. Penetapan upah minimum akan berdampak pada penajatan pekerjaan yang akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan. Sedangkan untuk tingkat pengangguran, ketika tingkat pengangguran meningkat maka tingkat kemiskinan juga meningkat dan ketika tingkat pengangguran menurun maka tingkat kemiskinan juga menurun. Selalu ada hubungan antara pengangguran dan kemiskinan karena orang yang menganggur tidak punya penghasilan dan pengaruhnya pasti miskin. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang cepat di negara berkembang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan dalam jangka panjang dapat menurun dan menambah jumlah penduduk miskin.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis panel data (Pooled Data). Sebagai alat menggunakan program E-views 9. Panel data merupakan kombinasi runtut waktu (time series) dan data silang (scross section). Data Panel dapat menjelaskan dua macam Informasi yaitu *scross section* (data silang) pada perbedaan antar subjek, dan informasi *time series* (runtut waktu) yang memfleksibelkan perubahan data waktu (Pangestika, 2015).

Data silang terdiri dari atas beberapa atau banyak objek, sering disebut responden 2 (misalnya perusahaan) dengan beberapa jenis data (misalnya laba, biaya iklan, laba ditahan, dan tingkat investasi) dalam suatu periode waktu tertentu. Karena data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series* maka tentunya akan mempunyai observasi lebih banyak dibanding data *cross section* atau *time series* saja. Akibatnya, ketika digabungkan menjadi pool data, guna membuat regresi maka hasilnya cenderung akan lebih baik dibanding regresi yang hanya menggunakan data *cross section* atau *time series* saja (Pangestika, 2015). Maka jika kedua data tersebut tersedia maka data panel dapat digunakan.

#### **HASIL PENELITIAN**

Sebelum menginterpretasikan analisis regresi data panel sebaiknya dilakukan pemilihan model regresi terbaik yang cocok untuk data yang digunakan dengan cara melakukan uji *chow* dan uji *hausman*. dilakukan untuk melihat model manakah yang lebih tepat, *common effect model* atau *fixed effect model*. Berikut merupakan hasil dari uji *chow* :

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	171,476748	(5,95)	0,0000
Cross-section Chi-square	358,092370	5	0,0000

Sumber : *Eviews 9* diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil uji *chow* didapatkan nilai *prob cross section F* sebesar 0,0000 dan nilai *chi square* sebesar 0,0000. Dan hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *prob.* < 0,05 yang berarti H0 ditolak, maka H1 diterima yang artinya model *fixed effect* lebih baik dari pada model *common effect*.

**Uji Hausman**

*Uji hausman* dilakukan dengan tujuan untuk melihat metode manakah yang lebih tepat antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Berikut merupakan hasil dari uji *hausman*:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5,337469	3	0,1487

Sumber : *Eviews 9* diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil uji *hausman* didapatkan nilai *prob.* Sebesar 0,1487 hal ini berarti nilai *prob.* > 0,05 yang menunjukkan bahwa H0 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa regresi dengan model *random effect* lebih baik daripada regresi menggunakan model *fixed effect*. Sehingga dalam penelitian ini metode regresi data panel yang digunakan adalah *random effect model*.

Interpretasi koefisien *random effect* digunakan untuk melihat dan menganalisis seberapa besar pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Berikut hasil uji *Random Effect Model* :

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Random Effect**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	36,35457	4,324523	8,406610	0,0000
UM?	-0,360066	0,053639	-6,712819	0,0000
TPT?	0,228938	0,190865	1,199479	0,2330
JP?	-0,056293	0,041094	-1,369843	0,1736
Random Effects (Cross)				
_B—C	0,371322			
_G—C	0,008491			
_P—C	2,643783			
_BB—C	4,176840			
_GU—C	0,439737			
_KG—C	9,574701			

Sumber : *Eviews 9* diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa :

- a. Koefisien regresi Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk yang dihasilkan di Kabupaten Boalemo sebesar 0,371322 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,37%.

- b. Koefisien regresi Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk yang dihasilkan di Kabupaten Gorontalo sebesar 0,008491 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,00%.
- c. Koefisien regresi Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk yang dihasilkan di Kabupaten Pohuwato sebesar 2,643783 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 2,64%.
- d. Koefisien regresi Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk yang dihasilkan di Kabupaten Bone Bolango sebesar 4,176840 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 4,17%.
- e. Koefisien regresi Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk yang dihasilkan di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,439737 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,43%.
- f. Koefisien regresi Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk yang dihasilkan di Kota Gorontalo sebesar 9,574701 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57%.

Berdasarkan 6 kabupaten/kota yang dianalisis, Pengaruh yang paling besar terdapat pada Kota Gorontalo yang memiliki koefisien regresi sebesar 9,574701 yang menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk sebesar 1%, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57%. Dan sebaliknya pengaruh yang paling rendah adalah Kabupaten Gorontalo yang memiliki koefisien regresi sebesar 0,008491 yang menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk sebesar 1%, maka akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,00%.

## PEMBAHASAN

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Hanifah dan Nurul Hanifah (2021) yang berjudul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan" menunjukkan bahwa variabel UM berpengaruh negatif signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Hasil ini sesuai dengan tujuan penetapan upah minimum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Semakin tinggi tingkat upah akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan pendapatan akan menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meningkatnya pendapatan juga berdampak pada kemampuan masyarakat untuk melakukan saving atau investasi. Atas dasar tersebut alangkah pentingnya bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tingkat upah yang sesuai dengan standar kriteria hidup layak agar masyarakat tidak hidup dalam kondisi miskin.

Hasil pengujian lain dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Ani Endrayani dan Made Heny Urmila Dewi (2018) yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali" dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil dari variabel Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin mengindikasikan bahwa pengangguran terbuka terdiri dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, penduduk yang memiliki pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu sehingga mereka di katakan menganggur. Hal tersebut juga disebabkan karena setiap tahunnya jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas (pelajar dan mahasiswa) terus meningkat. Namun, mereka masih tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, dikarenakan biaya hidup mereka masih dalam tanggungan orang tuanya. Kadangkala ada pekerja di perkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Selain itu juga, di zaman sekarang banyak orang yang memiliki pekerjaan seperti *online shop* yang sudah memiliki pendapatan namun belum menjadi wajib pajak sehingga status mereka masih belum memiliki pekerjaan. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin.

Hasil pengujian selanjutnya dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hafiz Nabawi (2020) yang berjudul "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang yang memperoleh hasil bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk yang pesat akan mengakibatkan pertumbuhan dari segala aktivitas sumber daya ekonomi yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang besar dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Peningkatan dari pendapatan per kapita penduduk berarti pula peningkatan kesejahteraan, peningkatan konsumsi dan berubahnya pola konsumsi itu sendiri, namun jika perkembangan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perubahan lapangan kerja maka mengakibatkan pengangguran yang besar. Tetapi dalam hal ini, di Provinsi Gorontalo pengaruh Jumlah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena banyaknya usia-usia produktif yang lahir sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan maupun bekerja di tempat lain yang mengurangi angka pengangguran itu sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian diatas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh tiga variabel yaitu Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo secara parsial sebagai berikut:
  - a. Variabel Upah Minimum Berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2017-2021, dengan nilai *coefficient* -0,360066 artinya, dengan meningkatkan Upah Minimum sebesar 1% akan di ikuti pula dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 36%.
  - b. Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2017-2021. Sesuai dengan hipotesis hal ini di sebabkan oleh tingkat pengangguran terbuka terdiri dari penduduk yang sedang mencari pekerjaan, yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, penduduk yang memiliki pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.
  - c. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo tahun 2017-2021.
2. Pengaruh tiga variabel bebas yaitu Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di provinsi Gorontalo secara simultan menunjukan bahwa variabel Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo tahun 2017- 2021

## SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas maka dapat di berikan saran terhadap hasil penemuan ini, yaitu :

1. Penetapan upah minimum harus tetap diberlakukan dan tingkat upah nya dinaikkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk melindungi pekerja. Karena diharapkan dengan upah minimum yang ada di suatu daerah dapat melindungi para pekerja nya dari kemiskinan. Karena dengan upah minimum seorang pekerja menerima upah yang sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak serta dapat terhindar dari garis kemiskinan. Upah minimum Kota/Kabupaten tiap tahun nya naik sesuai dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah.
2. Tingkat pengangguran yang masih tinggi membutuhkan upaya yang serius untuk menurunkannya. Untuk mengurangi tingkat pengangguran pemerintah dan pihak yang terkait diharapkan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah ijin pendirian usaha agar nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap. Memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat agar nantinya masyarakat dapat bersaing di dunia kerja, meningkatkan kewirausahaan yang dibekali dengan pelatihan khusus dan meningkatkan tingkat pendidikan sehingga keahlian yang dimiliki oleh pekerja dapat meningkat.
3. Jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai dari segi pendidikan, kesehatan, nilai moral dan etika dan lain sebagainya merupakan modal pembangunan yang handal bagi suatu negara, namun sebaliknya apabila kualitasnya rendah justru akan menjadi beban pembangunan sehingga akan menjadi penghambat pembangunan. Pemerintah sebaiknya memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang kronis, serta meperhatikan jumlah penduduk yang selalu meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Khabhibi. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011). Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.

Arikunto, S. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.

Bambang, Utoyo. (2016) Geografi Membuka Cakrawala Dunia 3. Pusat Pembakuan Departemen Pendidika Nasional.

Brown, Charles. (2018). Order Effects On Auditor Materiality Judgments: The Impact Of Qualitative Information. The Journal of Applied Business Research.

Dumairy. (2016). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Fitri Amalia. (2021). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kawasan Timur Indonesia (KTI) Periode 2011-2020. Econosains. Vol. X, No. 2, ISSN : 2579-8901.

Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS. 23. Edisi 8, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.



Hafiz Nabawi. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Kota Malang. *OECOMICUS (Journal Economics)*. Vol. 4, No. 2, Page 109-116.

Juergen J.E. Manoppo, Dkk. (2018) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Evisiensi*. Vol. 18, No. 02, ISSN : 1979-1496.

Kumalasari, M. (2011). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 19.

Kuncoro, Mudrajad. (2017). *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Mahmudah, M. (2017). Random Effect Model pada Regresi Panel untuk Pemodelan Kasus Gizi Buruk Balita di Jawa Timur Tahun 2013– 2016. *Jurnal Biometrika dan Kependudukan (Journal of Biometrics and Population)*, Vol 6 No 1, 52-61.

Mankiw, N. Gregory. (2006). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Mikkelsen, Britha. (2013). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. (Terjemahan : Matheos Nalle). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Muana, Nanga. (2001). *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Edisi Perdana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mustika, Candra. (2011). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 1 No. 4 Bulan Oktober 2011 hal 12-23.

Nasir, DKK (2008), Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Eksekutif*. Vol. 5 No. 4.

Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Prenada Group.

Ni Ketut Ani Endrayani dan Made Heny Urmila Dewi, (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Udayana*. Vol. 5, No. 1, 63-88.

Pangestika, Styfanda. (2015). Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), Dan Random Effect Model (REM). Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Prima, Sukmaraga. (2011). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan jumlah pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah, Universitas Diponegoro.

Rini, Atu Setya & Dugiarto, Lilik. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. 1–138.

Risma, Amelia. (2012). Analisis Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Skripsi). *Ilmu Ekonomi* Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor.

Sadiyah, Y. H., & Arianti, F. (2012). *Analisis kemiskinan rumah tangga melalui Faktor-faktor yang mempengaruhinya Di kecamatan tugu kota semarang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. (2010). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ketiga*. Jakarta; Rajawali Vers.

Sumarsono, Sonny. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK*, Volume 8(3).

Syamsiah, Badruddin. (2009). *Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru*.



Siti Hanifah Dan Nurul Hanifah. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. Independent (*Journal Of Economics*), Vol. 1, No. 3 E-ISSN 2798-508 Page 191-206.

Todaro, M.P. dan Smith, S.C. (2006). Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta.

Yogatama, I Made. (2011). Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Upah Pekerja, dan Nilai Total Ekspor Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia (1990-2009) . Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.